

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERIODE 2011-2015**

AR. Chaerudin

Email : ar.chaerudin.banten@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of economic growth, locally-generated revenue (PAD), revenue sharing fund (DBH) to the realization of Serang District capital expenditure in 2011-2015.

In this research used quantitative method is a method that aims to prove the truth of the hypothesis, statistical data analysis using SPSS software. Researchers observed aspects that closely related to the problem studied in a more specific so obtained data that support the preparation of research reports to be processed and analyzed based on the theory that has been studied so that obtained a description of the object and can be drawn conclusions about the problem under research.

The result of research in Serang District in 2011 until 2015, there is a significant influence between economic growth to capital expenditure, where according to SPSS calculation result obtained $t_{count} > t_{table}$ ($-36,406 > -12,706$) and significance value $< \alpha$ ($0,017 < 0,05$), then H_0 is rejected and H_a accepted. Between locally-generated revenue to capital expenditure there is a significant influence, based on the calculation of SPSS obtained $t_{count} > t_{table}$ ($123,776 > 12,706$) and significance value $< \alpha$ ($0,005 < 0,05$), then H_0 rejected and H_a accepted. Between revenue sharing funds on capital expenditure, based on the calculation of SPSS obtained $t_{count} > t_{table}$ ($65,804 > 12,706$) and significance value $< \alpha$ ($0,010 < 0,05$), then H_0 rejected and H_a accepted. And simultaneously there is a significant influence between economic growth, locally-generated revenue and revenue sharing fund to capital expenditure, based on hypothesis test results obtained $F_{count} > F_{table}$ ($6569,692 > 216$) and significance value $< \alpha$ ($0,009 < 0,05$), then H_0 is rejected and H_a accepted.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap realisasi belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, analisis data bersifat statistik yang menggunakan *software* SPSS. Peneliti mengamati aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk diproses dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian di Kabupaten Serang Tahun 2011 sampai dengan 2015, terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, dimana berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-36,406 > -12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,017 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal terdapat pengaruh yang signifikan, berdasarkan hasil

perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($123,776 > 12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,005 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Antara Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal, berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($65,804 > 12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,010 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Serta secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal, berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6569,692 > 216$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,009 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula.

Perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh potensi andalan serta unggulan yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa *variable-variable* kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Serang Periode 2011-2015.***

Rumusan Masalah :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2011-2015?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2011-2015?
3. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2011-2015?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan berpengaruh terhadap realisasi anggaran belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun 2011-2015?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap realisasi belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap realisasi belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap realisasi Belanja Modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Manfaat Penelitian :

1. Kegunaan Akademis
 - a. Bagi Kampus :
Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan yang pada gilirannya mempunyai nilai tambah guna peningkatan kualitas bagi pihak yang memanfaatkan penulisan ini.
 - b. Bagi Penulis
Sebagai bahan pendalaman materi sesuai dengan bidang keilmuan
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Instansi sebagai informasi tambahan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam bidang akuntansi manajemen serta bagi Instansi. Penelitian ini akan membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
 - b. Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan.

B. KERANGKA TEORITIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, tetapi kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber

daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah bukti nyata hasil usaha/kerja pemerintahan daerah dalam memajukan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan apabila didukung oleh infrastruktur atau sarana prasarana daerah yang baik. Infrastruktur atau sarana prasarana tersebut bisa didapat dari belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Daerah ayat 1 berbunyi Belanja Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa: Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh Pemerintah Daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, bila Pertumbuhan Ekonomi baik maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan alokasi Belanja Modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah dari potensi yang dimiliki oleh daerah. Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu dalam masa desentralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (*prinsipal*) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

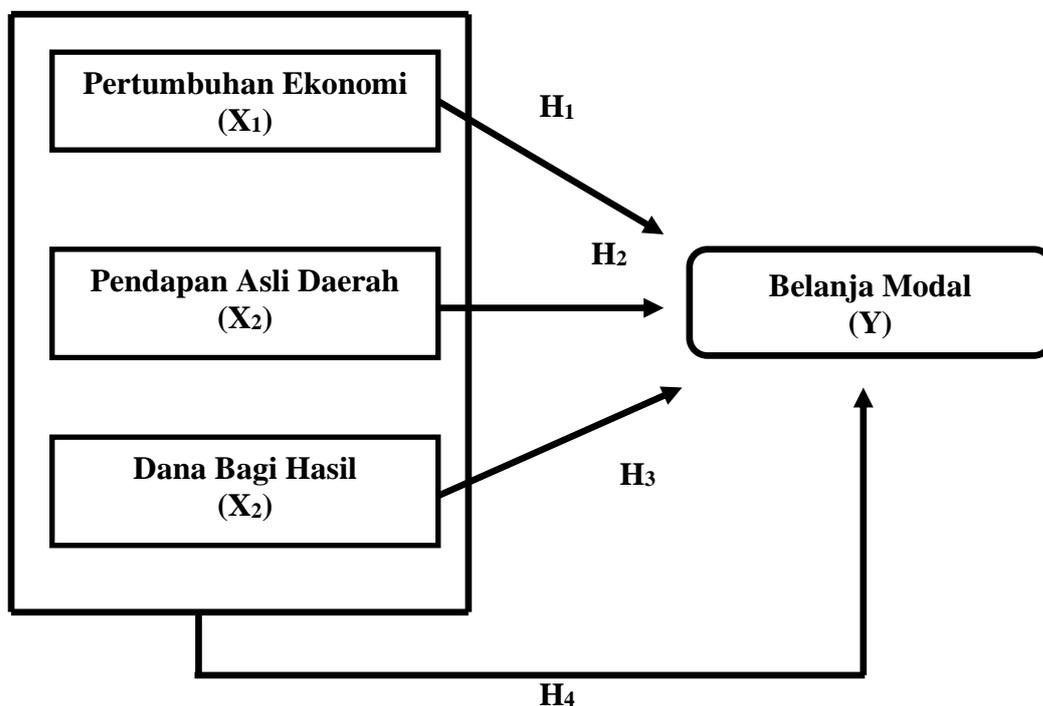
Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak penghasilan (PPh). Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dana Bagi Hasil adalah sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dibuat suatu kerangka teoritik yang dapat dilihat pada Gambar berikut :



C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Peneliti mengamati aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti secara lebih spesifik sehingga diperoleh data yang menunjang penyusunan laporan penelitian untuk diproses dan dianalisis berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai objek dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif yaitu metode yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran hipotesis, analisis data bersifat statistik yang menggunakan *software* SPSS.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹ Berdasarkan definisi di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. sedangkan sampel penelitian ini adalah data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Sedangkan metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive Sampling*, yaitu penentuan sampel dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Data diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
2. Data yang dipakai yaitu data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2015.
3. Selama lima tahun berturut-turut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang dipublikasikan atau telah diaudit.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)
Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat dan mempelajari buku, jurnal, literatur serta sumber-sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data sebagai landasan teori yang akan diterapkan pada masalah dalam penulisan skripsi ini.
- b. Dokumentasi

¹ *Ibid.*, h.90.

Pengumpulan data dengan melihat atau meninjau data yang diperlukan dalam penelitian berupa Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang.

Instrumen Belanja Modal

Variabel	Konsep variable	Pengukuran	Skala Ukuran
Belanja Modal (Variabel Y)	Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.	Rasio

Instrumen Pertumbuhan Ekonomi

Variabel	Konsep variable	Pengukuran	Skala Ukuran
Pertumbuhan Ekonomi (Variabel X ₁)	Pertumbuhan Ekonomi adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Rasio

Instrumen Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel	Konsep variable	Pengukuran	Skala Ukuran
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Variabel X ₂)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Rumus: (Pajak Daerah + hasil	Rasio

		Retribusi Daerah + hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah).	
--	--	--	--

Instrumen Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel	Konsep variable	Pengukuran	Skala Ukuran
Dana Bagi Hasil (Variabel X ₃)	Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Rasio

Teknik Analisis Data dan Hipotesis Statistik

Uji-t (Uji Parsial)

Uji-t bertujuan untuk melihat pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap Belanja Modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.
 $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
 $H_a : \beta_1 \neq 0$ Ada pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
2. Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
 $H_0 : \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
 $H_a : \beta_2 \neq 0$ Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_2) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
3. Pengaruh variabel Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal.
 $H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak ada pengaruh Dana Bagi Hasil (X_3) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
 $H_a : \beta_3 \neq 0$ Ada pengaruh Dana Bagi Hasil (X_3) secara parsial terhadap belanja modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Uji F (Uji Simultan)

Uji serempak (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap Belanja Modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah:

- $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
- $H_1 : \beta_1 \beta_2 \neq 0$ Ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pendapatan Asli Daerah (X_2) dan Dana Bagi Hasil (X_3) secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 36,406 dan t_{tabel} sebesar 12,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} nilai signifikansi sebesar 0,017 jadi signifikan karena kurang dari 0,05 maka hipotesis pertama diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wertianti (2013) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 123,776 dan t_{tabel} sebesar 12,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} nilai signifikansi sebesar 0,005 jadi signifikan karena lebih dari 0,05 maka hipotesis kedua diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan menggali potensi-potensi daerah daerah yang dimiliki, salah satunya dengan cara memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana oleh pemerintah daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Serang telah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana dan prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2015) dan Permatasari (2016) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 65,804 dan t_{tabel} sebesar 12,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} nilai signifikansi sebesar 0,010 jadi signifikan karena lebih dari 0,05 maka hipotesis ketiga diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil masih dibutuhkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam kegiatan anggaran belanja modal. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja modal yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah Daerah menggunakan Dana Bagi Hasil sebagai sumber dana untuk mengelola pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Permatasari (2016) yang menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2010-2014. Hasil perhitungan diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6569,692 dan F_{tabel} sebesar 216 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 Berdasarkan uji signifikansi diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikansi sebesar 0,009 jadi signifikan karena kurang dari 0,05, maka hipotesis keempat diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

Penerapan Otonomi Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena hal tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan keuangan daerahnya sendiri serta membuat kebijakan yang mampu mempengaruhi kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi, dengan mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah.

Sumber penerimaan utama bagi suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat, hal ini menunjukkan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut telah mandiri.

Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Pemerintah Daerah Kabupaten Serang memiliki ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi nilai manfaat lebih dari satu tahun.

E. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-36,406 > -12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,017 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
2. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($123,776 > 12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,005 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.
3. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($65,804 > 12,706$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,010 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($6569,692 > 216$) dan nilai signifikansi $< \alpha$ ($0,009 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan uji signifikansi diperoleh bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap belanja modal Kabupaten Serang tahun 2011-2015.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman Yusoff, *Defenisi Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi*, 2011
- Angriwan, Afrian Dita. *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Abstrak Penelitian, 2010
- Anon. *Pertumbuhan Ekonomi Banten Cukup Pesat*, 2011
- Anon. *Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2000-2009*, 2011
- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2004*
- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2005*
- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2006 / 2007*.
- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2008*.
- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka 2009*.
- Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan IV 2010*. Bank Indonesia-Serang, 2011.
- Bappeda. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012*.
- Bappenas. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD Dan Upaya Yang Dilakukan Daerah*. Jakarta : Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah, 2003.
- Gujarati, Damodar, Terjemahan Sumarno Zain. *Ekonometrika Dasar*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Hidayat, Afri, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara*. Kumpulan Skripsi Fakultas Ekonomi - USU, 2010.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE, 1999.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- Nawari, *Analisis statistik dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*, Elex Media Komputindo, 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006, *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduansyah, Mohamad. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor*. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.
- Saragih, Juli Panglima. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia, 2003.
- Setiawan, I Dewa Made Darma. *Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur, Bali, Dan NusaTenggara Barat : Pendekatan*

- Input-Output Multiregional*. Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 2011.
- Sidik, Machfud. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogjakarta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Tambunan, Tulus, 2006, *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*.
- Tarigan, R. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2004
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33, Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34, Tahun 2000, *tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.